



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT
KOMISI IV DPR RI**

- Tahun Sidang : 2020-2021
Masa Persidangan : V
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP)
Dengan : 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut sekaligus Plt. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
7. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Hari, Tanggal : Senin, 31 Mei 2021
Waktu : 16.10 WIB s.d. 18.00 WIB
Sifat Rapat : Terbuka
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Gedung Nusantara (KK-IV) Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta
Ketua Rapat : Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.
Acara : Membahas ABT 2021, RKA-K/L Tahun 2022, dan Isu-isu Aktual Lainnya
Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Tommy
Hadir : A. Anggota DPR RI:
36 dari 51 orang Anggota dengan rincian:
1. Fraksi PDI Perjuangan

1. SUDIN, S.E.
 2. RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.
 3. H. SUNARNA, S.E., M.Hum.
 4. Ir. MINDO SIANIPAR
 5. Ir. EFFENDI SIANIPAR
 6. VITA ERVINA, S.E., M.B.A.
 7. Drs. I MADE URIP, M.Si.
 8. Dr. H. SUTRISNO, S.E. M.Si.
 9. MARIA LESTARI, S.Pd.
2. Fraksi Partai Golongan Karya
 1. H.M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.
 2. BUDHY SETIAWAN
 3. Ir. ICHSAN FIRDAUS
 4. ALIEN MUS, S.H.
 5. Ir. H. HANAN A. ROZAK, M.Si.
3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
 1. Ir. DWITA RIA GUNADI
 2. RENNY ASTUTI, S.H., S.PN.
 3. Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS, M.Sc.
 4. Ir. H. T.A. KHALID, M.M.
 5. Dr. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si.
4. Fraksi Partai Nasional Demokrat
 1. YESSY MELANIA, S.E.
 2. Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.
 3. JULIE SUTRISNO
5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
 1. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.
 2. DANIEL JOHAN, S.E.
 3. LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.
 4. EDWARD TANNUR, S.H.
6. Fraksi Partai Demokrat
 1. MUSLIM, S.HI., M.M.
 2. Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.
 3. BAMBANG PURWANTO, S.ST., M.H.
7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
 1. drh. H. SLAMET
 2. Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.

3. H. JOHAN ROSIHAN, S.T.

8. Fraksi Partai Amanat Nasional

1. H. MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M.
2. SLAMET ARIYADI, S.Psi.

9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

1. K. H. ASEP A. MAOSHUL S.Sy.

B. Undangan

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI/ Drs. Antam Novambar, S.H., M.Hum.;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan/ Dr. Ir. Muhammad Zaini Hanafi, M.Si.;
4. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut sekaligus Plt. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan; serta
7. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Ketua Komisi IV DPR RI dan segenap Anggota Komisi IV DPR RI,

Yang terhormat Saudara Sekjen, Bapak Antam Novambar, Saudara TB Haeru Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, Saudari Ibu Artati Widiarti Dirjen Penguatan Budidaya, Inspektorat Jenderal Bapak Muhammad Yusuf Ustadz ini, PLT Dirjen Perikanan Tangkap semoga segera definitive, PLT ini kalau di kampung Pak Zaini Pejabat Lillahi Ta'ala Pak Sekjen, Muhammad Zaini, Ibu Rina dan Bapak Syarif dan segenap para pejabat Eselon III, Hadirin Eselon II dan III, hadirin sekalian yang berbahagia.

Mengawali rapat pada sore hari ini pertama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita dapat mengadakan RDP dalam keadaan sehat wal'afiat. Sebelumnya kami mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah mohon maaf lahir dan batin.

Sesuai dengan jadwal acara rapat DPR RI Masa Persidangan V, Tahun Sidang 2020-2021, yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI tanggal 8 April 2021 dan keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 17 Mei, pada hari ini Senin, tanggal 31 Mei 2021, Komisi IV DPR RI menyelenggarakan RDP dengan para pejabat Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka membahas ABT tahun 202, RKA-K/L Tahun 2022 dan isu-isu aktual lainnya.

Hadirin sekalian yang berbahagia.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 276 Ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, RDP hari ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
Setuju?

(RAPAT DIBUKA PUKUL 16.10 WIB)

RDP hari ini dimulai pada pukul 16.10 WIB dan akan diakhiri pada pukul 18.00 WIB, apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 254 Ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib atau azas atas kesepakatan bersama dengan susunan acara sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat;
2. Penjelasan para pejabat Eselon I KKP terhadap agenda rapat;
3. Tanggapan Anggota Komisi IV DPR RI;
4. Jawaban pejabat Eselon I KKP;
5. Kesimpulan rapat;
6. Penutup.

Apakah acara tersebut dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Bapak, Ibu yang kami hormati.

RDP hari ini mempunyai tiga substansi penting, pertama adalah penjelasan ABT Tahun 2021. Kedua, mendengarkan penjelasan RKA-K/L Tahun 2022. Dan ketiga, membahas isu-isu aktual yang berkembang saat ini.

Komisi IV DPR RI pada tanggal 8 April 2021 telah mengadakan RDP dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan membahas ABT. Hal ini sesuai dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK:/tambahan. Hal ini sesuai dengan surat Menteri Keuangan saya ulang, hal ini dengan sesuai dengan surat Menteri Keuangan nomor S-37/MK:/2021 tanggal 16 Maret 2021, hal penetapan satuan anggaran bagian anggaran 999.08 dari BA BUN pengelolaan belanja lainnya BA Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk

program rehabilitasi kawasan mangrove sebesar Rp43.337.900.000,- dan saat ini program tersebut telah berjalan.

Untuk itu Komisi IV DPR RI meminta penjelasan mengenai berjalannya program ABT terutama dalam pelibatan masyarakat di masing-masing daerah atau wilayah dalam rangka pemulihan ekonomi, perbaikan kualitas lingkungan dan antisipasi perubahan iklim global, rehabilitasi kawasan mangrove di wilayah pesisir Indonesia.

Bapak, Ibu yang kami hormati.

Selanjutnya berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-361/MK.02/2021 dan B.238/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2021, tanggal 29 April 2021 perihal pagu indikatif belanja K/L Tahun Anggaran 2022 KKP mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp6,122 triliun. Menurut data Komisi IV DPR dalam 5 tahun terakhir anggaran KKP secara tabel dan grafik mengalami penurunan bahkan dibandingkan dengan APBN Indonesia tidak mencapai 1%.

Hal tersebut merupakan catatan penting di mana Indonesia 2,3 adalah lautan dengan beragam potensi yang belum termanfaatkan secara optimal, sehingga berpotensi menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia di masa depan, namun dukungan anggaran sektor kelautan perikanan tidak maksimal. Untuk itu diperlukan dukungan program dan kegiatan secara terukur, efisien, efektif, serta memberikan dampak pertumbuhan ekonomi, baik di level keluarga nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, serta pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan maupun level pelaku usaha sektor kelautan perikanan yang ditunjang dengan sistem jaminan mutu terintegrasi dan sistem ketelusuran produk hasil kelautan perikanan berbasis teknologi 4.0.

Program dan kegiatan tersebut adalah program pemberdayaan kelompok kecil menengah pengolah, kelompok pengolah atau pemasar hasil perikanan, bantuan kapal, asuransi nelayan, dan pembudidaya ikan, alat penangkapan ikan, serta sarana fasilitas penunjang pelabuhan perikanan, kampung pembudidaya ikan, bioflok, bantuan benih ikan konsumsi, bantuan indukan ikan konsumsi, kluster ikan, udang, bantuan prasarana budidaya ikan, bantuan kepada pedagang olahan ikan, gemar ikan, bakti nelayan, bakti karantina ikan, bantuan alat pengolahan ikan pada UMKM, bantuan kelayakan berusaha bagi UMKM, serta pemasaran ikan pembinaan UMKM, serta inkubator bisnis, sarana prasarana penunjang proses peningkatan daya saing UMKM, dukungan Pendidikan, sekali lagi dukungan pendidikan kepada anak-anak nelayan pelaku usaha perikanan.

Ini saya pertegas sekali lagi, dukungan pendidikan kepada anak-anak nelayan pelaku usaha perikanan, sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan kepada pelaku usaha kelautan perikanan, sarana penunjang kegiatan pendidikan bagi Politeknik Kelautan Perikanan, penerapan hasil penelitian kelautan perikanan kepada masyarakat, dan program pencegahan praktek IUU fishing, serta praktek *destructive fishing* di seluruh wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Bapak, Ibu hadirin sekalian yang berbahagia.

Berikut adalah beberapa isu aktual yang perlu dicermati sebagai berikut:

1. Kebijakan ekspor benih lobster yang belum dicabut secara resmi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.
2. Laporan perkembangan tentang peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bagi sektor kelautan dan perikanan, terutama dampak dari tiga Peraturan Pemerintah, yakni PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan PP Nomor 27 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.
3. Perkembangan ABT Tahun 2020 pada Ditjen Perikanan Budidaya yang gagal tersalurkan, sehingga berdampak menurunnya kepercayaan masyarakat pada program dan kegiatan KKP.
4. Laporan perkembangan dari rangkaian proses sistem jaminan mutu hasil produk kelautan dan perikanan. Saya ulangi, laporan perkembangan ABT Tahun 2020 pada Ditjen Perikanan Budidaya yang gagal tersalurkan sehingga berdampak menurun kepercayaan masyarakat kepada program dan kegiatan KKP.
5. Laporan perkembangan dari rangkaian proses sistem jaminan mutu hasil produk kelautan dan perikanan yang terintegrasi, di mana tidak ada lagi tumpang tindih tugas dan fungsi. Hal ini sesuai dengan keputusan atau kesimpulan RDP tanggal 1 April 2021, sehingga diharapkan dapat meningkatkan iklim berusaha sektor kelautan dan perikanan.
6. Diperlukan pembenahan serta inventarisasi seluruh aset Kementerian Kelautan dan Perikanan, baik kepemilikan lahan atau tanah, dan bangunan terutama yang bersifat sewa ataupun kerja sama dengan instansi lainnya, dan aset-aset lain yang dikuasai oleh perorangan ataupun perusahaan swasta di seluruh Indonesia, sehingga tidak sehingga tidak terjadi perpindah tanggungan atau aset KKP.

Demikian pengantar yang kami sampaikan. Selanjutnya kami persilahkan kepada Sekjen Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan penjelasan terkait hal tersebut di atas.

Kami persilakan.

KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.):

Ijin Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Ketua.

KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.):

Saya langsung kemudian Dirjen Tangkap, saya mau tanya yang mengelola Pelabuhan Muara Baru itu siapa?

PLT. DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP (Dr. Ir. MUHAMMAD ZAINI HANAFI, M.Si.):

UPT Pak, jadi ada dua Pak, satu UPT dan satu Perum Perindo.

KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.):

Apa tugasnya UPT di sana.

PLT. DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP:

UPT itu melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan.

KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.):

Contohnya.

PLT. DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP:

Tambak labuh kemudian ketertiban, syahbandar dan sebagainya.

KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.):

Infrastruktur jalan dan got pembuatan air tanggung jawab siapa?

PLT. DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP:

Kalau jalan itu dikelola oleh Perum.

KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.):

Jalan oleh Perum ya, kemudian got pembuangan air oleh Perum ya.

PLT. DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP:

Bukan, itu kalau yang sifatnya umum itu dikelola oleh UPT Pak.

KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.):

Jadi gini, di sana itukan tidak hujan pun banjir, bisa 1,5 meter, satu hari banjir itu bisa 24 jam yang terjadi apa? Stagnan tidak ada bisnis di sana. Makanya waktu itu saya tanyakan, saya juga agak bingung yang mengambil uang sewa lahan di situ itu Perum, masa yang memperbaiki UPT kan nggak mungkin. Coba ya Pak Sekjen ya, kita ngomong secara global dulu ini. Saya tanya itu jalan sampai ada yang tinggi, ada yang rendah, kemudian got saluran air juga nggak jelas, dia bilang itu tanggung jawab UPT. Terus bilang “enak sekali orang *you* yang ambil sewa lahan kok”. Coba saya minta tolong ditertibkan dulu ya, ditertibkan, dilaporkan ke kita nanti, supaya jelas pembagiannya. Jangan giliran hak, “oh, ini hak saya mengambil uang sewa”, tanggung jawab ya tanggung jawab kamu, itukan nggak benar.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Ketua.

Perlu saya sampaikan kepada Pak Zaini, bahwa satu objek dikelola orang dua itu pasti ada masalah. Ada *overlap* di sana, sehingga tatkala ada infrastruktur jangankan di luar di dalam saja terjadi tarik-menarik, ureusan lift saja. Itulah salah satu contoh, bagaimana ini padahal potensi untuk memasukkan uang rakyat kepada kas negara.

Kami persilahkan kepada saudara Sekjen.

SEKJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (Drs. ANTAM NOVAMBAR, S.H., M.Hum.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua,
Om swasti astu,

Namo budhaya,
Salam kebajikan.

Yang terhormat Bapak Ketua, para Wakil Ketua, Bapak-Ibu Anggota Komisi IV DPR RI, serta para pejabat Eselon I dan II Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mencurahkan rahmat-Nya, sehingga pada sore hari ini kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan Rapat Dengar Pendapat antara DPR RI Komisi IV dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam rangka membahas Anggaran Belanja Tambahan tahun 2021, RKA-K/L Tahun 2022 dan isu-isu actual lainnya.

Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Berdasarkan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S37/MK:/2021 tanggal 16 Maret 2021, KKP mendapatkan alokasi Anggaran Belanja Tambahan atau ABT sebesar Rp43,34 miliar yang diperuntukkan untuk kegiatan penanaman mangrove di 4 provinsi dengan target luasan sebesar seluas 2.008 hektar, yakni di provinsi Jawa Tengah ada di 6 Kabupaten, Jawa Barat 10 Kabupaten, dan Banten 3 Kabupaten, serta Jawa Timur 11 Kabupaten/Kota.

Kegiatan yang dilaksanakan berupa penanaman bibit mangrove, bantuan sarana, upah padat karya, dan kegiatan pendukung lainnya. Dapat kami laporkan bahwa perkembangan dan pelaksanaan kegiatan ini, antara lain di Provinsi Jawa Tengah dalam tahap identifikasi lokasi dan rencana penanaman dilakukan pada minggu keempat bulan Juni. Provinsi Jawa Barat dan Banten dalam tahap pengadaan bibit dan ajir, dan rencana penanaman akan dilakukan pada minggu kesatu bulan Juni. Provinsi Jawa Timur dalam

tahap verifikasi kelompok pelaksana penanaman dan rencana penanaman akan dilakukan pada minggu kedua bulan Juni.

Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S361 dan B238, tanggal 28 April 2021, perihal pagu indikatif belanja K/L Tahun 2022, KKP mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp6.122 miliar dengan terdiri dari belanja operasional sebesar Rp2,6 triliun dan belanja non operasional sebesar Rp3,5 triliun. Pagu Indikatif Tahun 2022 ini turun dari pagu alokasi 2021 sebesar Rp6,5 triliun.

Adapun rancangan pagu indikatif tahun anggaran 2022 per program terdiri dari, program pengelolaan perikanan dan kelautan sebesar Rp2.180 miliar, program nilai tambah daya saing industri sebesar Rp187.300 juta, program kualitas lingkungan hidup sebesar Rp86,98 miliar, program pendidikan dan pelatihan vokasi sebesar Rp273 miliar, program riset inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar Rp59,94 miliar, dan terakhir program dukungan manajemen sebesar Rp3.320 miliar.

Selanjutnya perkenankan kami menyampaikan rancangan kegiatan prioritas unit kerja Eselon I KKP Tahun 2022, sebagai berikut:

1. Kegiatan prioritas Ditjen Perikanan Tangkap, antara lain penyediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pemungutan PNPB sumber daya alam perikanan tangkap pasca produksi, bantuan dalam rangka peningkatan kesejahteraan nelayan, seperti kapal perikanan 5 GT, alat penangkapan ikan, fasilitasi sertifikat hak atas tanah nelayan, diversifikasi usaha nelayan, premi asuransi nelayan, kampung nelayan maju dan fasilitas jaminan hari tua nelayan. Pengembangan korporasi nelayan, perizinan usaha melalui Silat dan Simkada, pengelolaan perikanan berbasis WPP-NRI dan penerapan e-logbook penangkapan ikan.
2. Kegiatan prioritas Ditjen Perikanan Budidaya, antara lain pembangunan kawasan tambak udang dan bandeng, pembangunan kampung perikanan budidaya, bantuan sarana prasarana budidaya, pakan mandiri, pra sertifikat lahan budidaya, dan pengujian residu untuk ekspor dan kebijakan tata kelola bidang perikanan budidaya.
3. Kegiatan prioritas Ditjen Penguatan Daya Saing, antara lain pembangunan sentra kuliner ikan, pengembangan prasarana raiser ikan hias, sentra pengolahan ikan, sarana pasca panen, kampanye gemar ikan, promosi produk perikanan skala internasional, pasar ikan, pembinaan mutu dan penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan atau SKP, chest freezer, peralatan pengolahan, gudang beku pada kawasan shrimp estate dan sentra produksi perikanan tangkap, implementasi sistem resi gudang, kendaraan berpendingin, pabrik es, serta pembinaan dan fasilitasi UMKM untuk keberlanjutan usaha.
4. Kegiatan prioritas Ditjen Pengolahan Ruang Laut, antara lain pengelolaan kawasan konservasi, rehabilitasi kawasan mangrove, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, bantuan kelompok pergerak

- konservasi, gerakan cinta laut, penanganan sampah di pesisir, rencana zonasi di KSN atau KSNT, pengembangan usaha garam rakyat, sarana prasarana wisata bahari, dermaga apung, dan bantuan ekonomi produktif di pesisir dan pulau-pulau kecil.
5. Kegiatan prioritas Ditjen Pengawasan PSDKP, antara lain operasional kapal pengawas, operasional pesawat patrol, pembangunan kapal pengawas, operasional sistem pemantauan SDKP, operasional speed boat, pembinaan Pokmaswas, operasional pengawasan kepatuhan kapal perikanan, operasional pengawasan kawasan konservasi dan destruktif fisik.
 6. Prioritas Badan Riset SDM Kelautan dan Perikanan, antara lain pelatihan masyarakat kelautan dan perikanan, penyuluhan kelompok pelaku utama atau usaha kelautan dan perikanan, penyelenggaraan pendidikan vokasi, riset perikanan, riset kelautan, riset pengolahan produk dan bioteknologi, model sosial dan ekonomi, melakukan kajian stok atau stok assessment di wilayah pengolahan perikanan, dan WPP perairan daratan atau WPPPD, dan penyediaan atau rehabilitasi sarana prasarana untuk mendukung kegiatan riset dan pengembangan sumber daya manusia .
 7. Kegiatan prioritas Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu, antara lain pengawasan mutu hasil perikanan, sarana prasarana pengujian mutu, layanan sertifikasi karantina, penyelesaian kasus pelanggaran karantina ikan, sarana-prasarana pengawasan karantina, penerapan standar sistem manajemen mutu dan pengawasan di wilayah perbatasan.
 8. Kegiatan prioritas untuk di Sekretariat Jenderal, antara lain layanan penyiapan produk hukum, SDM aparatur dan organisasi, keuangan, perencanaan, kerja sama antar Lembaga, administrasi dan pengadaan barang dan jasa, humas dan kerja sama luar negeri, data dan statistik, pengelolaan modal usaha kelautan dan perikanan, serta dekonsentrasi di 34 provins.
 9. Kegiatan prioritas Inspektorat Jenderal, antara lain pengawasan akuntabilitas mitra Inspektorat 1 sampai 5 dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan.

Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwa mengingat masih banyaknya peran strategis KKP dalam agenda pembangunan nasional yang belum tertampung dalam pagu indikatif tahun 2000-2022, serta untuk dapat melaksanakan kegiatan prioritas utamanya untuk kepentingan masyarakat dalam pemulihan ekonomi dan ketahanan pangan, maka KKP mengusulkan tambahan pagu anggaran sebesar Rp8.043 miliar, yang terdiri dari belanja operasional sebesar Rp236.061.000.000 untuk pemenuhan belanja pegawai dan operasional perkantoran di pusat serta di daerah. Dan belanja non operasional sebesar Rp7.806 miliar yang akan digunakan dalam rangka melaksanakan program prioritas nasional dan terobosan KKP.

Adapun rincian kegiatan usulan tambahan pagu anggaran sebagaimana bahan yang telah kami sampaikan, untuk itu kami mohon dukungan dari seluruh Komisi IV DPR RI.

Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Ijinkan kami juga melaporkan realisasi kredit usaha rakyat sektor Kelautan dan Perikanan pada periode Januari sampai April 2021, adalah sebesar Rp2.320 miliar meningkat 48,1% dari capaian periode yang sama tahun 2020 dengan jumlah debitur sebanyak 68.540 debitur. Realisasi penyaluran dana kelola BLU LPMUKP sampai dengan 19 Mei 2021 telah mencapai Rp116.520.000.000 untuk 1.912 orang pemanfaat. Dalam kurun waktu bulan Januari sampai dengan 24 Mei 2021, KKP juga telah melakukan operasional pemberantasan illegal fishing dan berhasil menangkap sebanyak 92 kapal ikan. Ini kami koreksi 94 kemarin yang terakhir kita tambah 2 lagi dari Philipina tapi belum masuk, 94 kapal, 70 kapal ikan Indonesia, 24 kapal ikan asing yang melakukan illegal fishing.

Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Demikian dapat kami sampaikan pada Rapat Dengar Pendapat kali ini, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan selama ini dari Komisi IV DPR RI. Seluruh saran, masukan, dan rekomendasi dari Komisi IV DPR RI akan menjadi bahan acuan untuk perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan KKP.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera,
Om santi santi om,
Namo Budhaya,
Salam kebajikan.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih atas penjelasan yang telah disampaikan oleh saudara Sekjen KKP, Bapak Antam Novambar atas penjelasan yang telah disampaikan. Selanjutnya kami persilahkan.

INTERUPSI F-PARTAI GOLKAR (Ir. MOH. ICHSAN FIRDAUS):

Pak Ketua, saya boleh interupsi sedikit.

KETUA RAPAT:

sebentar dulu, titik dulu baru interuspi, biar tidak terpotonglah bahasanya.

F-PARTAI GOLKAR (Ir. MOH. ICHSAN FIRDAUS):

Interupsi sebentar.

KETUA RAPAT:

Kami persilakan kepada Anggota Komisi IV DPR RI untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapannya. Kami persilakan saudara Ichsan interupsi.

F-PARTAI GOLKAR (Ir. MOH. ICHSAN FIRDAUS):

Bukan, saya mau interupsi sebentar.

KETUA RAPAT:

Interupsi ya, nggak bertanya.

F-PARTAI GOLKAR (Ir. MOH. ICHSAN FIRDAUS):

Pak Sekjen, saya mau tanya ini ada satu, dua Dirjen yang nggak kelihatan, ini kemana, misalnya Dirjen Budidaya sama Dirjen ini hadir dimana. Biar tahu kita sebelum bertanya.

KETUA RAPAT:

Rangkap jabatan, silakan Pak Sekjen.

SEKJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Untuk Dirjen Budidaya pensiun, lalu PLT-nya Pak TB. Haeru, untuk Dirjen PSDKP sedang proses dari sudah lelang besok assesment kebetulan saya PLT-nya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Dan ada suratnya sudah, jadi sah untuk menjawab.

Kami persilakan Ibu Endang, 3 menit karena waktunya sudah 16.30 WIB. Kami persilakan untuk bijak sehingga jam 18.00 WIB sudah bisa kita simpulkan bersama-sama.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS, M.Sc.):

Baik.

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua,

Shalom,

Om Swasti astu,

Namo budhaya,

Salam kebajikan,

Salam Indonesia Raya.

Terima kasih kepada Bapak Ketua yang saya banggakan, Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI yang selalu saya banggakan, Yang kedua Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan serta jajarannya, dan juga seluruh pejabat Eselon I sampai Eselon III yang mendampingi.

Pertama kali saya mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, mohon dimaafkan lahir dan batin. Puji syukur kita panjatkan keharadirat Allah SWT, bahwa kita masih dalam keadaan sehat wal'fiat bisa berkumpul dalam suasana yang sangat membanggakan ini.

Pak Ketua dan Bapak Sekjen yang saya hormati.

Banyak sekali peraturan yang sudah dikemukakan melalui Pak Sekjen ini dengan Permen-Permennya, tentu saja kami dari Partai Gerindra sangat mengapresiasi. Ada 14 poin Pak, yang akan kami kemukakan, tentu saja poin-poin tertentu saja yang harus saya tidak lanjut, karena terbatasnya waktu tadi.

Yang pertama adalah kebijakan fiskal tadi Pak, jadi Fraksi Partai Gerindra meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan lebih berpihak kepada peningkatan kesejahteraan nelayannya, pembudidaya sektor kelautan perikanan, juga petambak garam, masyarakat pesisir, serta usaha kecil produk kelautan dan perikanan. Saya hadir sendiri dan dapat apresiasi katanya baru pertama kali Anggota Dewan datang ke Sindang Barang. Nah, di sana jalannya Pak, luar biasa jalan menuju ke lokasi itu saya jalan pacuan itu Pak, pacuan kuda. Jadi mohon Pak, harus ada kerja sama infrastruktur ini Pak. Nah, di sana sudah ada koperasi yang bagus Pak, tapi petani garamnya disampingkan. Nah, jadi mohon koperasi-koperasi di sana digiatkan, karena kita tentunya ingin mengurangi *capital outflow* dari desa ke kota. Dan saya sudah menghadap Pak Bupati Pak, untuk ikut proteksi dalam hal koperasi.

Nah yang kedua Pak, Mungkin Pak Sekjen harus membenahi SOP di semua Direktorat Jenderal KKP ini tidak sama Pak, sehingga saya dan para TA juga bingung, karena sering dikontrakan ke EO. Ke EO yang tidak bisa bertanggung jawab Pak, kalau saya tanya detail "ini Bu, keputusan dari Direktorat Jenderal". Nah, ini harus dibenahi Pak, karena membuat brand image KKP jadi jelek, saya ikut prihatin Pak.

Nah, yang ketiga tentang tadi Pak, ekspor. Eskpor untuk ikan-ikan hias, ini juga harus ada perhatian. Karena dari Kementerian Pertanian sudah mempopulerkan juga tanaman yang ada di dalam air. Nah, ada sinergi karena itu merupakan ekspor yang cukup mahal. Jadi mohon kepeduliannya dari Sekjen dan Direktorat Jenderal yang lain untuk bekerja sama dengan tenaga tenaga riset yang ada di perguruan tinggi, baik itu di Jepang maupun di Indonesia sendiri Pak. Jadi di beberapa perguruan tinggi sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menambah *income* petambak-petambak kita.

Nah, mungkin hanya itu saja Pak, karena waktunya saya sudah buat laporannya ada 14 poin. Mudah-mudahan Pak Sekjen beserta bisa

mengantisipasi kegiatan-kegiatan ini dengan bimbingan-bimbingan teknologi yang sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Jadi tidak disamakan dengan *top down policy*.

Terima kasih.

*Wabillahi Taufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih.
Telah memanfaatkan 3 menit pas tadi.
Silakan Ustad Johan Rosihan.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pertama saya dukung keinginan untuk kenaikan anggaran Pak, karena catatan saya 6 tahun terakhir KKP ini turun terus 2015 10,65, 2016 10,61, 2017 90,14, 2018 7,63, 2019 5,51 dan 2020 5,26 triliun. Sekarang pertanyaannya kira-kira apa komitmen dari Kementerian ini dengan penambahan anggaran Rp8 triliun ini. Apakah dengan penambahan ini kita akan tetap impor garam, apakah dengan penambahan ini, misalnya kondisi para petambak kita, nelayan kita, tetap seperti ini atau bagaimana. Jadi saya ingin yang Rp8 triliun itu komitmennya, gambarnya seperti apa Pak Sekjen agar dukungan kami ini kemudian semakin bertambah kuat.

Yang berikutnya, apresiasi saya terima kasih Bapak Sekjen atas pelayanan yang bagus atas berbagai program-program di lapangan, seperti bulan mutu karantina, gemar makan ikan, *alhamdulillah* dan di tempat saya Pak, pelayanan dari KKP sungguh luar biasa, terima kasih Ibu Dirjenya. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan seperti ini bisa terus dikembangkan, baik ditambah kualitasnya maupun perlu ditingkatkan kuantitasnya.

Yang berikutnya kami menyampaikan pada kuartal I tahun 2021 ini terjadi peningkatan 19,6% impor garam dibanding kuartal I tahun lalu dan pemerintah berencana impor terus tahun ini yang bisa mencapai 3,07 juta ton garam. Sementara itu daya dukung anggaran yang disiapkan untuk pengembangan garam nasional tahun 2022 hanya sebesar Rp39 miliar. Hal ini sangat disayangkan karena tidak ada terobosan Pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi garam demi membela kondisi petambak kita yang menjerit dalam situasi pandemi ini. Itu yang saya bilang tadi Pak, jangan sampai nambah 8 kita masih tetap mengandalkan impor. Kalau masih seperti itu saya nggak jadi dukung.

Yang berikutnya saya minta penjelasan dari KKP terkait penyaluran dana ABT tahun 2020 lalu, terutama pada Dirjen Perikanan Budidaya di mana program tersebut tidak tersalurkan kepada masyarakat yang berhak. Hal ini mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap program dan kegiatan

KKP selanjutnya. Harus ada komitmen baru dan terobosan agar program ABT 2021 ini dapat berjalan dan mengembalikan kepercayaan masyarakat yang telah kita kecewakan itu.

Berikut, mempertanyakan perkembangan komitmen KKP dalam menyelesaikan gagal bayar ABT 2020 pada kelompok-kelompok pembudidaya ikan dalam program pemulihan ekonomi nasional sebagaimana permintaan Komisi IV DPR RI pada Raker-Raker akar-akar sebelumnya.

Terakhir, mempertanyakan anggaran KKP yang terus menurun. *Alhamdulillah* tadi sudah. Saya lanjutkan saja, dengan anggaran yang rendah berdampak pada rendahnya performa kinerja dari KKP untuk menggarap potensi perikanan kita yang luar biasa, karena potensi lestari sumberdaya ikan laut diperkirakan mencapai 12,54 juta ton per tahun, yang disebar di seluruh wilayah perairan kita. Demikian juga rendahnya jumlah tangkapan yang baru dimanfaatkan KKP, serta total produksi perikanan tangkap yang masih sangat rendah dan potensi mikro flora fauna kelautan belum terekplorasi sebagai kekayaan alam hayati dan sumber pangan yang luar biasa. Padahal kami sudah catat bahwa PNPB dari Perikanan Tangkap ini adalah 12 triliun. Saya tidak akan hapus ingatkan saya itu, karena itulah janji seorang Menteri.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selanjutnya Daniel Johan.

Saya atas nama Pimpinan dan segenap Anggota Komisi IV DPR RI mengucapkan selamat Waisak, semoga bahagia selalu.

F-PKB (DANIEL JOHAN, S.E.):

Terima kasih Pak Kyai, semoga berkah semua.

Pimpinan, segenap Anggota, Pak Sekjen dan segenap jajaran Dirjen, Kepala Badan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat sore,
Mohon maaf lahir batin, minal aidin.

Saya singkat saja Pimpinan dan Bapak Sekjen. Yang pertama adalah penegasan terhadap Pak Johan, tahun lalu anggaran yang tidak terealisasi cukup besar, sehingga tahun ini kita dorong bisa dialokasikan kembali. Sehingga untuk mendukung juga apa yang menjadi semangat KKP seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Sekjen, kita berharap baik anggaran 2021 yang berjalan maupun ABT itu bisa digunakan semaksimal mungkin dalam bentuk program padat karya, baik berbentuk Bintek atau untuk mendukung

UMKM yang akan menggerakkan pendapatan dan daya beli masyarakat di tengah pandemi saat ini. Itu yang pertama.

Yang kedua adalah terkait pengawasan di laut Pak Sekjen, terutama Pak Dirjen Tangkap. Di tengah keterbatasan armada kita para aparat, nah kita berharap KKP itu bisa mengisi lautan kita dari para kapal-kapal penangkap nasional. Sehingga kapal-kapal tanggap kita itu juga bisa menjadi kekuatan Garda terdepan dalam membantu kita semua menjaga lautan kita dari kapal-kapal ilegal asing. Nah, tadi Pak Sekjen jelas kan ada 70, tapi itu 70 berbendera Indonesia Pak Sekjen, itu kenapa masuk tanpa ijin, bodong. Artinya kita berharap yang bodong bisa dibina sehingga dia bisa menjadi kekuatan industri perikanan kita. Dan yang ada juga bisa dipermudah, sehingga kekuatan perikanan kita bisa punya harapan yang jauh lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Dua hal itu saja yang saya sampaikan.
Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Alien Mus.

F-PARTAI GOLKAR (ALIEN MUS, S.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan Bapak, Ibu Anggota Komisi IV DPR RI dan tentunya kepada Bapak Sekjen beserta Eselon I dari KKP mohon maaf lahir dan batin, selamat memasuki bulan penuh dengan kekomitmenan kita antara mitra dan juga Komisi IV DPR RI.

Saya ingin pertama-tama karena tadi yang disampaikan oleh Pimpinan saya, bahwa kita harus mengetahui regulasi untuk kita tahu turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja dari KKP ini saya juga kemarin menanyakan ada beberapa turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja sudah diajukan mungkin, tapi belum disahkan atau belum dilegalkan atau belum keluar dari Menkumhamnya. Maka dari itu tolong kita juga disampaikan agar kita mengetahui persis kegiatan apa saja yang memang betul-betul sudah ada aturannya yang disesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja.

Kemudian saya ingin menyampaikan bahwa kemarin satu bulan lalu atau dua minggu, tiga minggu lalu kalau nggak salah ada nelayan yang keluar dan kapalnya kalau tidak salah ada masalah di perairan Australia dan *Alhamdulillah* sudah balik ke Indonesia. Apakah tidak adanya uji kelayakan untuk kapal, kalau memang ini ada di Perhubungan kalau bisa ini ditarik ke KKP, karena ini sangat betul-betul berkaitan dengan keselamatan para nelayan.

Ketiga, saya ingin menyampaikan bahwa kalau seandainya tadi diminta atau mau ditambahkan anggaran sebesar Rp8 triliun dan juga belanja non operasionalnya hampir Rp7 triliun kalau nggak salah ya, tadi yang disampaikan Pak Sekjen, karena Pak Sekjen matanya melihat kesini.

KETUA RAPAT:

Rp8 triliun.

F-PARTAI GOLKAR (ALIEN MUS, S.H.):

Rp8 triliun, tapikan di sini ada belanja non operasional dan operasional Pak. Saya di sini jelas kalau dibacakan sama Pak Sekjen, saya harus tulis Pak, karena ini nanti juga menjadi atensi kita dan juga pengawasan kita untuk proses penganggarannya.

Saya berharap bahwa kita harus melihat potensi-potensi yang betul-betul menjadi andalan kita di sektor perikanan, baik itu di pelabuhan, baik itu di pasarnya, baik itu di kapalnya, baik itu di nelayannya. Mohon maaf saya ingin menyampaikan bahwa lumbung ikan nasional kita gadang-gadangkan, gaung-gaungkan dari 15 tahun lalu sudah masuk dan menjadi atensi dari Komisi IV DPR RI dan juga KKP, tapi ini kok jadi simpang siur. Mohon maaf, saya ingin bertanya dengan kejelasannya apakah lumbung ikan nasional itu ada di Provinsi Maluku dan Maluku Utara ataukah ada provinsi lain yang mau bergabung atau mungkin dari Provinsi Maluku Utara akan bergabung dengan Provinsi yang lain, karena ini terlihat bahwa hasil dari satu provinsi mungkin digabungkan dengan provinsi lain bagaimana dengan PAD-nya, bagaimana dengan private hasil perikananannya, bagaimana dengan pajaknya.

Baik Pak Sekjen, saya ingin menyampaikan karena ini juga termasuk dari salah satu isu-isu yang strategis yang harus kita pertanyakan. Kalau seandainya lumbung ikan nasional itu kalau nggak salah kita melihat bahwa Inpres Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Kawasan Perikanan, harus ada SKPT. Dan lumbung ikan nasional ini yang menjadi harapan bagi Maluku dan Maluku Utara untuk bisa bersaing dengan tempat-tempat atau daerah lain. Kalau soal IUPI dan Maluku Utara kemarin mungkin waktu RDP sama KKP dengan provinsi atau dinas-dinas yang lain terus tidak, maksudnya ada kategori-kategori khusus, tolong kita lihat bagaimana *priority*-nya.

Kemudian kalau saya mau sampaikan Citilink sudah bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Morotai dijadikan tempat untuk ekspor ikan langsung ke Jepang pakai Citilink. Kalau untuk Kota Ternate itu untuk ekspor perikanan dan juga pertanian. Ini untuk menjadi atensi Pak Sekjen. Kemudian saya ingin bertanya, nanti mungkin saya minta penjelasan dari PDS Ketua, data pasar ikan domestik dan juga internasional. Sebenarnya saya juga ingin mempertanyakan sebenarnya NTN ini, target NTN berapa sih sebenarnya. Kalau 102 dan 105, mohon maaf para nelayan masih tetap miskin Pak dan Ibu. Jadi apa yang harus dilakukan, apa yang harus ditargetkan, apa yang harus betul-betul di-*push* dari KKP *new born* ini untuk bisa naik NTN-nya 150-160. Ini perlu ada gerakan yang luar biasa, tolong disampaikan juga

kepada Pak Menteri, bahwa kapal untuk 115 pengawasan ini memang harus ditambah, kalau tidak ilegal fishing mau sampai kapan pun pasti tetap akan terjadi.

Kemudian tolong sampaikan juga New Ambon itu dibuka untuk apa ya, untuk pelabuhan perikanan kah atau untuk apa. Kalau seandainya pelabuhan-pelabuhan khusus untuk perikanan kenapa KKP saja yang tanggung jawab ini, anggarannya kenapa nggak ditarik dari Perhubungan misalkan ke KKP. Sehingga ada targeting dan usaha yang betul-betul konsekuen antara perikanan yang pastinya sarana dan prasarannya itu betul-betul terjamin, baik dari pelabuhan, baik dari kelayakan uji kapalnya untuk para nelayan, baik dari pasarnya. Nah, kemarin kami ke Muara Baru itu ada UPT yang katanya menjadi tanggung jawab dari KKP. Ada beberapa tadi yang sudah sampaikan sama Ketua saya, tapi saya ingin menyampaikan ada kalau nggak salah itu parkiran ya kalau nggak salah, tu termasuk dari UPT-nya KKP, tapi juga tidak ada kelayakan lah di sana itu. Ini tolong UPT-UPT KKP yang betul-betul bertanggung jawab di Perindo Muara Baru sana tolong bisa dilihat, karena nanti kita nggak tahu ini mau salahkan siapa. Kalau saya sih melihat Perindo sudah termasuk merugikan negara juga. Kalau memang itu menjadi tanggung jawab KKP dan besarnya ke KKP kenapa nggak KPP saja yang tanggung jawab semua, maksudnya seperti itu.

Itu saja Ketua, karena Ketua melirik saya sudah 4 kali, berarti sudah 4 menit. Saya mengerti Ketua, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Ibu Riezky.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Oke.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Buka maskernya biar jelas.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Mungkin ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Dari tadi saya mencoba menyimak disampaikan, baik dari Pimpinan dan para Anggota. Saya menyambut baik yang disampaikan oleh Pak Johan, Ibu Alien, dan juga beberapa teman, karena saya ingat tahun lalu beliau komplain tentang overstock tuna di Maluku Utara. Bahwa hari ini coba Pak Sekjen itu diminta kembali Dirjen-Dirjennya untuk membuka sumber daya ikan itu dengan wilayah pengelolaan ikan itu ada berapa wilayah. Karena yang tadi disampaikan kapal

Australia masuk langsung *direct* ke Beijing, ngambil tiger shrimp langsung berangkat ke Jepang untuk dibikin tempura, kan begitu. Jadi saya mendukung anggaran Bapak tadi bahkan kalau bisa lebih dari itu ya. Kenapa? yang seperti saya sampaikan lautnya luas anggarannya kecil. Nah, ini yang menjadi bahan pemikiran yang paling mendasar. Karena contoh karena kebetulan suami saya orang Papua, *the most fertile fishing ground in the world* itu ada di laut Arafura, makanya kalau orang timur hobinya makan ikan laut saya nggak heran.

Jadi coba wilayah pengelolaan perikanan Bapak itu dibuka khususnya Indonesia timur, paling tidak itulah yang memang harus memang betul-betul diangkat potensinya, termasuk sarana prasarannya Pak. Sarana prasarannya memadai nggak, saya ingat Pak Sekjen pernah duduk di sana gimana kita mau ngejar kapalnya, orang kapalnya nggak kuat mau ngejar kapalnya, benar juga itu. Contoh saja kapal yang urusan sungai saja Pak, saya nggak mau naik, kenapa? karena ternyata pernah bocor di Batam saya disuruh naik ya nggak mau lah, bunuh diri itu namanya kan, begitu.

Nah, kemudian saya harap wilayah pengelolaan ikan perikanan ini untuk menjadi skala prioritas supaya kluster-kluster yang menjadi cita-citanya Pak Menteri juga itu stop dulu kita bicara kluster, tapi wilayahnya dulu coba dipetakan dengan baik. Saya nggak tahu ya apakah kalau di pertanian katanya ada *agri culture war room*. Saya nggak tahu apa itu Pak Menteri pernah ngomong "Oh, ya kami bisa mengetahui *on board*-nya", tapi *on board*-nya kapal *receiver*-nya, ada *receiver*-nya nggak Bapak dan Ibu. Nah, itu coba ya kalau memang ternyata ada kita boleh tahu dong di mana *receiver*-nya, *receiver* terima yang waktu itu kan Pak Menteri bilang kami mengetahui titik-titik koordinat kapal itu di mana ya kan, berarti ada *receiver*-nya, dimanakah *receiver*-nya saya ingin tahu. Mungkin temen-temen Komisi IV DPR RI juga tahu nggak ada atau nggak saya rasa nggak paham juga ya.

Nah, itu jadi garis besarnya untuk yang pertama adalah bagaimana betul-betul wilayah pengelolaan perikanan yang ada di Indonesia itu terutama laut timur Indonesia yang *the most fertile in the world* yang *Insyah Allah* katanya kalaupun kiamat datang katanya nggak akan hilang itu, banyak di situ jadi ya cobalah dikelola dengan baik, karena permasalahan di Indonesia hari ini adalah tata kelola ya.

Nah, kemudian juga tadi disinggung lagi oleh Pak Ketua Sudin, Pak Ketua Hasan, dan juga temen-temen yang lain kembali lagi bicara apa? Port, pelabuhan, terus tadi bicara Perinus kana tau Perindo, ya apa lah. Kemarin ke pasar ikan modern yang ada di Muara Karang, Muara Baru, saya punya pasar ikan modern yang *Insyah Allah* sekarang jadi pasar ikan hias doang di Palembang ya. Saya minta tolong project-project besar yang ada di KKP ini boleh berkenalan kiranya supaya kami bisa mensupport rincian *output*-nya itu seperti apa sih, sudah sampai mana sih, kenapa Pak saya ngomong brush stock yang ada di wilayah Sumatera Selatan waktu itu sudah di selebrasi, tapi sampai sekarang saya cek sendiri ke lokasinya itu zonk, tidak ada isinya, tidak ada pembangunannya. Saya kesana sendiri dan saya punya dokumennya.

Saya ingatkan sekali lagi....

KETUA RAPAT:

Kita Kunspek saja kesana.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Silakan Pak, dengan senang hati karena jaraknya bisa langsung terbang, langsung ke Lubuk Linggau, bisa langsung ke Musi Rawas. Kemudian juga masalah anggaran ya Bapak-Ibu. Kita men-support anggaran, anggaran Bapak-Ibu ya inikan contoh tadi sempat kita ngobrol *list of priority* tadi adalah padat karya misalkan. Padat karya ini mau gimana, contoh BKIPM Rp498 miliar expensive Rp362 miliar itu untuk kebutuhan internal kurang lebih kan misalkan kayak begitu. Tadi sih saya sempat ngobrol waktu belum rapat sama KKP, rapatnya sama pertanian. Apa nggak mungkin karantina ini dilebur saja jadi satu, buktinya Litbang saja bisa jadi sekarang apa BRIN kalau nggak salah. Karena apa? Toh komoditinya doang yang beda, memberatkan Kementerian akhirnya, ini cuma sekedar saran ya.

Dan terakhir *list of priority* tadi, DJPT juga Dirjen Perikanan Tangkap ya, intinya *list of priority* Bapak itu seperti apa. Jangan printilan kecil-kecil tapi kaedahnya nggak ada buat masyarakat hari ini. Tadi bicara nilai tukar nelayan ya kalau saya sih lebih konsen nilai tukar nelayan itu, kenapa? kalau nilai tukar petani mungkin masih agak lebih manusiawi daripada nilai tukar nelayan. Jadi ada kurang lebih 5 poin ya kita mendukung Pak. Kalau saya malah nggak mau Bapak itu ngajuin Rp8 triliun kurang ya, tapi harus tetap tadi Bapak jabarkan dulu RO-nya Bapak kemarin apa, hasilnya gimana, efeknya gimana, karena laut Bapak luas. Ini saya coba menyampaikan ini. Jadi sekali lagi skala prioritas terkait dengan nilai tukar nelayan dan wilayah pengolahan perikanan Bapak yang terbagi di beberapa wilayah itu dimaksimalkan.

Saya akhiri.

*Wabillahi Taufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

Ibu Nur'aeni.

F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):

Baik, terima kasih Pimpinan.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua.*

Pimpinan beserta Anggota Komisi IV DPR RI, Pak Sekjen beserta jajaran Eselon I Kementerian KKP yang saya hormati.

Mungkin dari saya mewakili dari Fraksi Demokrat, untuk bisa menyampaikan pada kesempatan yang baik ini. Pertama, kaitan anggaran ABT yang memang difokuskan untuk penanaman mangrove ya. Banten salah satunya lokasi yang akan diberikan program tersebut, tentu mengucapkan terima kasih dan kini juga program yang sangat tepat saya kira untuk bisa memberikan solusi yang berkelanjutan dalam upaya melindungi wilayah pesisir laut dari abrasi. Salah satunya Banten juga merupakan wilayah pesisir laut yang cukup panjang.

Dan sama dengan disampaikan tadi Pak Johan, kita juga ingin mengevaluasi terhadap program yang memang belum bisa digunakan sempat tertunda. Tentu kita juga ingin tahu apa sih kendala utama, apakah memang masih dimungkinkan, karena ini juga menyangkut soal *trust* dari masyarakat Dapil kita, baik kepada kami maupun untuk Pemerintah.

Kaitan dengan anggaran APBN 2022, dalam kesempatan yang baik ini juga sama ingin disampaikan bahwa tidak ada alasan Anggota Komisi IV DPR RI ini untuk tidak mendukung terhadap penambahan anggaran untuk KKP ini. Jadi pada intinya semua ini kita dukung apalagi KKP ini merupakan sektor untuk mendukung ketahanan pangan kita dari sektor perikanan tentunya. Dan tentu juga memiliki sisi yang positif sekali, bahwa penyumbang terbesar dalam peningkatan PDB di APBN kita, sangat miris apabila Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan tidak bisa menggulirkan untuk bisa memberikan tambahan. Tapi di sini juga butuh keyakinan apakah Menteri KKP dan jajarannya mampu untuk memberikan keyakinan kepada Pemerintah melalui Menteri Keuangan. Di samping itu mengenai tambahan Rp8 triliun ini juga kita juga minta tidak hanya berbicara gelondongan Rp8 triliun. Rp8 triliun ini apa sih yang akan dilakukan, akan di-*break down* kemana. Yang jelas Rp8 triliun kita berharap bahwa anggaran program serta kebijakannya untuk bisa mensejahterakan para petani kita, masyarakat khususnya, di samping itu meningkatkan nilai tukar nelayan.

Kalau bicara APBN, kita tahu APBN itu kan sebagai instrumen untuk bisa meningkatkan pertumbuhan pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi. Tapi kan paling berapa persen untuk bisa menyumbang terhadap pergerakan pembangunan serta perekonomian kita. Nah, di sini dituntut Kementerian khususnya KKP, tidak hanya kegiatan itu hanya murni melulu menghabiskan dan hanya melulu bergantung kepada APBN. Tapi saya mendorong bagaimana lebih lagi meningkatkan dari sisi kinerja, membuat suatu terobosan, inovasi, serta kebijakan yang selama ini kita rasakan masih belum optimal keberpihakannya kepada para nelayan kita, apalagi di sisi tadi untuk bisa menyumbang besar untuk negara. Tadi setuju bagaimana illegal fishing ini bisa diminimalisir dengan meningkatkan pengawasan kapal-kapal besar kita untuk bisa mengantisipasi kapal-kapal asing yang masuk wilayah laut kita. Kebanyakan kapal asing contoh dari China masuk ke wilayah Natuna. Nikan tidak terawasi secara baik.

Nah, ini mohon ditingkatkan walaupun tadi ya bicaranya masih minim anggaran, tapi bagaimana dengan anggaran yang sekarang ini mungkin ya dalam tanda petik sangat miris tapi bagaimana meningkatkan komitmen serta

kinerja dari KKP itu sendiri. Belum bicara bagaimana juga kita juga meminimalisir dari impor garam yang memang setiap tahun ini semakin meresahkan. Dan mungkin juga hal yang lain seperti bagaimana juga KKP juga mampu untuk mengendalikan terhadap pengawasan kaitan dengan pencemaran laut yang ada di tanah air kita.

Dan terakhir mungkin saya juga ingin mengetahui terhadap apa yang selama ini dilakukan dengan adanya mungkin turunan dari Undang-Undang Ciptaker melalui kluster pangan. Sejauhmana KKP sendiri melakukan upaya-upaya integrasi, koordinasi, dengan beberapa Kementerian. Agar apa? agar dari sisi kebijakan program yang disusun ini juga sesuai amanat yang sudah diturunkan beberapa undang-undang dari undang-undang tadi ya kluster pangan itu.

KETUA RAPAT:

Terakhir Ibu.

F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):

Iya, terakhir.

KETUA RAPAT:

Sudah dua kali terakhir ini.

F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):

Soalnya belum puas, dan mungkin yang terakhir, terakhirnya dua kali. Jadi yang terakhir kita tahu visi misi Menteri KKP kita inikan meningkatkan produksi perikanan kita ya, meningkatkan produksi ikan kita. Nah, akan tetapi disini mungkin program-program yang sudah mungkin kita dengarkan, kita lihat, bahwa di sini seperti kontradiktif. Satu sisi meningkatkan produksi, sisi yang lain kegiatan terhadap mungkin sarana prasarana. Dari tahun 2021 itu mungkin programnya lumayan tapi di 2022 ditiadakan, seperti contoh seperti kapal perikanan yang ukurannya 5 Gt, 10 GT, bahkan dihilangkan. Mohon penjelasan kenapa demikian.

Nah, kita juga ingin tahu apa sih program *skyrim farming* itu untuk dijelaskan dan serta tadi adanya kegiatan program kualitas lingkungan hidup, bentuk kerja sama kelompok kompak ini seperti apa. Dan yang terpenting masyarakat kita ini, baik penyuluh perikanan dan nelayan kita ini butuh sekali wawasan kaitan dengan mungkin diberikannya Bimtek ataupun bentuk sosialisasi yang sifatnya agar mereka mengetahui cara pemanfaatan teknologi sektor perikanan, juga bisa meningkatkan dari sisi kualitas ya produksi agar lebih meningkat serta memiliki daya saing terhadap produksi hasil perikanan kita serta turunannya.

Demikian Pak Ketua.

Terima kasih.

*Wabillahi Taufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih, saya khawatir nggak bisa landing saja tadi, karena terakhirnya dua kali, berkali-kali.

Pak Asep Maoshul, Pak Kyai biasanya cepat.

F-PPP (K. H. ASEP AHMAD MAOSHUL AFFANDY, S.Sy.):

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pertama, saya ucapkan terima kasih beberapa program dari gemar makan ikan itu sudah dilakukan, tetapi baru bagi-bagi ikan. Yang saya maksud bagaimana kita bisa mengkampanyekan kesadaran mereka, kalau cuma membagi-bagi kan mereka mau, nggak tahu dimakan atau dijual lagi juga nggak tahu. Tapi kesadaran mereka untuk konsumsi ikan ini, maka diperlukan program lain mengkampanyekan bagaimana pentingnya mengkonsumsi ikan. apakah itu dengan. Contoh misal umpamanya dengan memakai menggunakan baliho ya, apalagi kalau balai itu isinya Anggota DPR di situ, kesannya itu itukan bisa nambah-nambah anggaran lain buat Anggota DPR, itu juga ada Pak Menteriya, ada himbauan-himbauannya. Saya lihat di televisi nggak ada itu himbauan gemar makan ikan.

Yang kedua Pak, beberapa waktu lalu saya bersama ke Pak Menteri ke Pangandaran. Saya tercengang di situ ada beberapa unit program di situ, ada apa namanya di Komplek Pelabuhan Cikidang Pangandaran. Di situ ada apa namanya akuarium gede itu apa namanya itu Piamari, ada juga pendidikannya, ada produksi pakan ikan, tapi saya lihat kok kayaknya belum selesai terkatung-katung gitu, itu sangat disayangkan. Dan saya sebagai Anggota Dapil dari situ banyak ditanya, saya nggak bisa jawab. Untuk itu, melalui Pak Ketua saya minta jawaban secara tertulis mengenai perkembangan Komplek Pelabuhan Cikidang Pangandaran, baik itu Piamari, sarana lainnya, termasuk Pendidikan, dan juga ada beberapa tambak pelatihan-pelatihan.

Itu saja Pak Ketua, saya nggak banyak-banyak.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

Yang paling akhir Ibu Yessy Melania.

F-NASDEM (YESSY MELANIA, S.E.):

Terima kasih Ketua, atas waktu diberikan kesempatan terakhir. Semoga waktunya juga bisa agak lebih panjang.

Yang saya hormati Ketua dan seluruh Anggota Komisi IV DPR RI, dan Bapak Sekjen beserta jajaran Eselon I Kementerian Kelautaan dan Perikanan.

Hari ini saya mencoba menyimak tadi beberapa pemaparan, penjelasan, pertanyaan juga dari rekan-rekan Komisi IV DPR RI terkait RDP kita hari ini. Yang pertama, saya mencoba untuk memperdalam terkait anggaran Pak Sekjen beserta jajaran. Saya agak tanda tanya dan sedikit apa ya miris mungkin, karena kalau dilihat kurva trendnya itu hampir setiap tahun kok menurun terus. Ini kenapa, apa memang karena keuangan yang tidak cukup ataukah ada yang salah dengan tata kelola, prosedur, dan program-program kebijakan di KKP. Ini yang jadi pertanyaan mendasar bagi saya.

Kemudian saya mencoba lagi mencari penyebab mungkin ya Pak Sekjen beserta jajaran. Apa karena serapan anggarannya yang cenderung dari KKP ini lemah, karena saya lihat tadi iseng coba buka salah satu Ditjen Budidaya, saya mencoba lihat ini di halaman 4 antara ap ini *output*-nya ada kolom realisasi, ada persentasi juga masih banyak yang 0%, belum ada yang di atas 50%, ini hanya pengelolaan irigasi tambak hanya itu, yang lain saya lihat belum ada progress sama sekali. Nah, ini mengkhawatirkan menurut saya ini sudah hampir pertengahan tahun tapi serapannya proses realisasi di lapangan masih sangat rendah.

Kemudian yang berikutnya saya mencoba melihat persyaratan mungkin, ini koreksi saja untuk KKP persyaratan untuk calon-calon penerima bantuan program dari KKP ini banyak mengeluh persyaratan secara administrasinya sangat sulit. Dinilai cenderung tidak relevan dengan kondisi masyarakat kita di daerah. Itu yang berikutnya.

Dan yang terakhir mungkin terkait penyuluh perikanan. Jadi bukan hanya pertanian yang akan kita genjot untuk penyuluh, karena bagaimanapun garda terdepan di sektor pertanian, entah itu perikanan itu penyuluhan pendampingan di lapangan. Dan saya dapat *report* Bapak Sekjen beserta jajaran, contoh kecil saja di salah satu kabupaten di Kalimantan Barat, satu kabupaten yang isinya hampir 200 desa penyuluh perikanan hanya 26 orang, itu gimana bisa maksimal bekerja. Nah, ini juga jadi atensi mungkin untuk rekan-rekan di KKP ke depan untuk bisa menambah penyuluh perikanan kita, supaya perikanan ini juga tidak cenderung saya pikir ini seolah-olah yang sektor ataupun yang Dapil atau yang wilayahnya itu kelautannya tidak ada, bahkan tidak ada laut tapi di perikanan budidaya ini bisa digenjot, dimaksimalkan salah satu pendampingan di lapangan bersama penyuluh-penyuluh perikanan.

Kemudian tadi saya mendengar sekilas pemaparan dari Bapak Sekjen, anggaran di 2022 saya mendengar ada di sekitar Rp8 triliun ya rencananya untuk bisa diajukan dan dengan komposisi ini saya dapat bahan dari Fraksi

54% ini untuk dukungan manajemennya. Sementara untuk yang sifatnya produktivitas menyentuh masyarakat kita di sektor perikanan itu hanya 46%. Nah, ini juga kami menilai dari NasDem agak cenderung bisa tidak ya untuk yang dukungan manajemen ini dikurangi, diminimalisir, dimanfaatkan, dimaksimalkan ke yang lebih produktif untuk sektor-sektor perikanan yang menyentuh langsung ke masyarakat.

Kemudian terkait program untuk Sekjen dan jajaran kami mengapresiasi terkait gemar ikan, bulan mutu karantina dan yang sifatnya pembinaan, edukasi, kepada masyarakat itu sangat kami apresiasi terutama kegiatan gemar ikan. Ya kalau memang bisa ya ke depan bisa di tambah lagi dipertahankan dan ditambah, karena gemar ikan ini kita melihat Indonesia juga stunting masih sangat tinggi angkanya. Kemudian dampak dari gemar ikan ini seolah-olah memaksa UMKM lokal kita untuk bisa berdikari itukan menciptakan apa sih potensi perikanan kita dan lain-lain. Tapi juga kami mohon dukungan sarana prasarana, dukungan alat-alat untuk pengolahan, misalnya lele bisa diolah jadi abon dan lain-lain itu juga sangat penting diberikan kepada UMKM lokal kita.

Ya mungkin itu Ibu beserta jajaran semua dari KKP yang bisa saya sampaikan. Dan terakhir mungkin saya sudah sedikit, sedikit bosan berbicara ketika rapat dengan KKP saya minta tolong wilayah yang mungkin tidak ada laut jangan di nomor sekian kan untuk program-program yang menyentuh masyarakat. Contoh sekali lagi di Kalimantan Barat walaupun tidak ada laut secara global, secara banyak, tapi di sana sangat punya potensi ikan arwana, siapa yang tidak kenal ikan arwana. Ekspor ke luar negeri juga arwana red Kalimantan Barat yang terkenal. Kemudian ikan belida juga potensi kerupuk basah dan lain-lain itu juga dari Kalimantan Barat Kapuas Hulu. Nah, ini saya minta mungkin ke depan ada gebrakan yang nyata dari KKP untuk wilayah-wilayah potensial seperti itu di luar laut.

Mungkin itu saja Pak Sekjen, Pak Ketua Hasna dan Ketua Sudin.

Terima kasih banyak.

Selamat sore.

F-PARTAI GOLKAR (ALIEN MUS, S.H.)

Pimpinan, lupa tidak lebih dari satu menit.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PARTAI GOLKAR (ALIEN MUS, S.H.)

Pimpinan, saya cuma ingin mau mengklarifikasi saja karena kemarin waktu kita rapat dengan KLHK di situ ada Undang-Undang 50 Tahun 1999 tentang Konservasi, di situ ada terumbu karang. Ini perlu kita ketahui bersama karena memang terumbu karang itu termasuk juga, termasuk salah satu yang diillegalkan. Apakah karena izin yang dikeluarkan dengan KLHK ternyata ada permasalahan dengan KKP. Kalau menurut saya apa saja yang mengandung

atau masuk dalam unsur perairan, baik di laut maupun daratan, maupun di sungai, itu saya pikir bisa dipertanggungjawabkan oleh KKP maksud saya. Jadi tolong mungkin ada koordinasi bersama antara KKP dengan KLHK tentang Undang-Undang 50 Tahun 1999 tentang Konservasi.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih kepada segenap Anggota Komisi IV DPR RI yang telah bijak....

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Pak Kyai, sedikit saja karena nggak ada pendalaman sedikit.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Slamet.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Saya mengingatkan Pak Kyai kepada Pak Sekjen dan juga khususnya Pak Zaini Pak Dirjen, ketika kita melakukan Reses ada Pak Dirjen, ada masyarakat, untuk sudah diokekan untuk pendalaman salah satu pelabuhan di Aceh. Betul Pak Salim ya, ini Pak Salim sudah malu menyampaikan, sehingga lewat saya ini karena saya ikut kunjungan. sehingga 2022 mohon diperhatikan. Itu saja Pak Kyai.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

Kami persilakan kepada Bapak Sekjen untuk mengatur siapa yang harus menjawab dan tidak harus detail jawabannya, karena punya kewajiban juga menjawab tertulis.

Silakan Pak Sekjen.

SEKJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Yang terhormat Bapak Ketua, Wakil Ketua,
Bapak-Ibu Anggota Komisi IV DPR RI yang kami cintai.

Sebagai mitra harus saling mencintai.

KETUA RAPAT:

Biar tidak munafik Pak ya.

SEKJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Iya, terima kasih atas sarannya banyak saran, koreksinya, sebelumnya juga keberatannya. Itu semua untuk kemajuan kita semua untuk rakyat kita, terutama menyangkut nelayan atau petani garam, masyarakat pesisir. Banyak yang kami sependapat seperti punya dari Ibu Endang untuk prioritas peningkatan kesejahteraan rakyat. Sedangkan untuk kerja sama di infrastruktur akan kami koordinasikan dengan PUPR di Sindang Barang terutama. Sedangkan untuk SOP yang Ibu keberatan para Dirjen ada di sini tolong diperhatikan, dikordinasikan, diperbaiki, jangan memalukan. Para Dirjen yang makai EO-EO coba lihat EO-nya EO benaran apa nggak itu. Jangan dilihat di iklan Instagram diambil gitu. Untuk kerja sama riset dengan perguruan tinggi sudah berjalan Bu, kami sudah berjalan. Jadi intinya waktu kami mengajukan tentang riset di Bappenas itu harus sama dengan apa namanya standarnya dari BRIN sekarang. Ini termasuk apa namanya di *blue print*-nya BRIN atau nggak, kalau nggak kita nggak bisa melakukan riset di luar BRIN.

Untuk Pak Johan, dengan tambahan Rp8 triliun juga tadi dari yang lain ada menyampaikan Ibu Yessy terakhir tentang Rp8 triliun. Yang diharapkan adalah meningkatkan produktivitas nelayan yang Rp8 triliun ini, terutama di pembudidayaan, pembudidayaan petambak garam. Untuk garam diusulkan dibuat ada *washing plan* nanti yang Rp8 triliun itu ini yang kita gunakan memang bukan hanya untuk yang lain. Lalu untuk koreksi kenapa manajemen kok tinggi, itu nggak bisa biaya manajemen itu gaji, ya itu bahasanya saja bayar listrik di situ semuanya, jadi agak besar dia memang. Untuk ABT tahun 2020 yang gagal bayar mohon maaf, sudah diusulkan tambahan anggaran pada tahun 2021, namun belum dapat dipenuhi, akan dioptimalkan pada tahun 2021.

Untuk Pak Daniel Johan, kapal ikan Indonesia *alhamdulillah* kami sudah mengadakan pertemuan dengan Kejaksaan, itu tentang 24 kapal yang kami sita, nanti akan bisa dimanfaatkan oleh nelayan Indonesia, itu semuanya bagus-bagus saya sudah turun ke lapangan itu bagus sekali dan tidak terlalu besar untuk operasionalnya. Sedangkan yang untuk 70 kapal Indonesia memang hanya dilakukan kegiatan administrasi tapi peningkatan dari bukan hanya teguran juga mereka dikenakan denda.

Untuk Ibu Alien Mus, turunan Undang-Undang Cipta Kerja di kami ada 18 Permen. 9 Permen sudah menunggu pengundangan, sedangkan yang lainnya harmonisasi. Kebetulan kami selalu koordinasi dengan Dirjen Perundang-undangan untuk mensegerakan turunan Undang-Undang CK yang 18 Permen di KKP. Sedangkan untuk lumbung ikan nasional, tadi rapat kami dengan Menteri Perhubungan juga dengan itu yang dulu pertama kita ajukan kan hanya Rp1,5 triliun untuk Maluku Utara dan Rp1,5 triliun untuk Maluku sebagai lumbung ikan nasional, *Alhamdulillah* sudah berjalan ternyata lebih daripada harapan, yaitu terakhir diajukan adalah disetujui Rp4,8 triliun, jadinya lebih malah. Dan dikonsentrasikan di pelabuhan atau di Maluku dulu di Maluku, nanti dengan harapan Maluku Utara itu nempelnya ke Maluku. Itu sekarang sudah dalam tahap pendataan, nantinya akan segera dibebaskan karena diperluas sebanyak 700 hektar itu pelabuhannya untuk pelabuhan yang kami koordinasi terus. Dan hari ini tadi, tadi hari ini kami dengan Sekjen

Perhubungan lagi menyusun MoU antara KKP dengan Kementerian Perhubungan. Dan kami sependapat untuk meningkatkan pengawasan dan pemberantasan *illegal fishing*.

Sedangkan yang tadi masukan dari Bu Alien, terakhir terumbu karang dengan KLHK kami setuju Ibu sebetulnya untuk dikurangi lah itu apa namanya ekspor terumbu karang yang sekarang ada di KLHK itu. Kami akan memberikan masukan karena nakal-nakal itu eksportir terumbu karang ini.

Untuk Ibu Riezky Aprilia, WPP ada 11 dan akan dioptimalkan. Jadi ada zonasi nantinya, zonasi 714 itu hanya khusus tidak boleh ada penangkapan dalam arti penangkapan besar oleh nelayan-nelayan kecil boleh. Itu khusus untuk pengembangbiakan. Terima kasih untuk dukungan anggaran ke KKP Ibu riezky dan sebagai untuk kegiatan bersifat padat karya, kami sudah bicarakan tadi itu yang kita utamakan nanti untuk padat karya. Karena banyak di semua Dirjen bisa melakukan padat karya, pembinaan, bimbingan teknis, penyuluhan itu bisa, dan itu memang perlu karena Ditjen Tangkap misalkan dia mensosialisasikan tentang harus alat tangkap yang ramah lingkungan kan itu bisa mungkin kita akan anggarkan.

Untuk Ibu Nur'aeni terima kasih dukungan terhadap tambahan anggaran KKP. Sependapat agar bisa dilakukan pengurangan impor garam tadi yang Rp8 triliun itu yang kita gunakan selain untuk budidaya. Untuk peningkatan pengawasan kita maksimalkan yang ada dulu. Kapal-kapal kita, kita maksimalkan. Kalau kita bicara tentang Natuna, Natuna Utara, Laut Natuna Utara selalu ada kapal di sana dan selalu dapat. Jadi terakhir kami rapat minggu lalu dengan TNI Angkatan Laut, Bakamla, Pol Air, kita sepaham semuanya kita bersama-sama untuk menjaga bukan hanya ikannya saja yang kita jaga sebetulnya kedaulatan yang kita jaga disitu. Jadi perbatasan itu kalau kita ada mereka kita tangkap betul itu memang daerah kita. Jadi itu selain menjaga potensi perikanan yang sebenarnya adalah menjaga kedaulatan negara.

Untuk Bapak Asep, sependapat perlunya sosialisasi tadi sama dengan sosialisasi atau pembinaan teknis....

KETUA RAPAT:

Lanjut yang ada orangnya saja Pak.

SEKJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN:

untuk Ibu Yessy, terkait dengan serapan anggaran di tahun 2017 hanya 68%, 2018 naik 79%, 2019 88%, sedangkan di tahun 2020 memang ada peningkatan menjadi 91%, namun yang PEN-nya ini sama sekali itu luar biasa kami minta maaf itu memang untuk apa sentuhan langsung kepada masyarakat malah itu yang kami tidak bisa laksanakan. Dan kebetulan Dirjennya mungkin kurang semangat sekarang sudah pensiun itu, nanti tidak yang baru ini, yang baru harus komitmen untuk kegiatan-kegiatan yang langsung menyentuh kepada masyarakat harus itu yang didahulukan.

Untuk jumlah penyuluh perikanan mungkin tadi sama juga akan ditambah dengan kalau memang toh bukan pegawainya juga kegiatannya berupa padat karya, penyuluhan atau bimbingan teknis. Untuk yang tadi sudah saya sampaikan untuk program dukungan manajemen itu besar memang, tapi itu sebetulnya gaji yang paling banyak itu. Untuk Kalbar akan jadi perhatian terutama untuk ikan sama kita akan melakukan ada Kampung Sema, kami sudah bicara dengan kepala dinas dan dengan gubernur.

Mungkin itu saja yang kami sampaikan kalau lebih kurangnya terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ada yang belum dijawab Pak tadi, Badan Karantina coba Undang-Undangnya kan sudah ada sampai sejauh mana diskusinya itu.

SEKJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Terima kasih Pak.

Untuk Badan Karantina kami sudah diskusi dengan Pak Menteri. Jadi lambat-lambat memang Karantina kan nanti disatukan, kami lebur. Kami hanya memang nanti dimutunya saja di PDS. Jadi kami akan tarik itu yang dari Karantina orang-orang yang bisa untuk mutu, untuk mutu saja, untuk Karantinanya memang, untuk cari itunya memang harus di Badan Karantina Nasional.

Terima kasih.

F-PARTAI GOLKAR (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Sebentar dulu, Pak Ketua dulu yang tadi pencet, nggak apa-apa katanya Aceh dulu.

F-PARTAI GOLKAR (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Saya juga disuruh Pak Ketua tadi WA.

Baik, saya langsung saja tadi mungkin saya memang titip sama Pak Slamet tadi Pak Sekjen, masalah lumbung ikan tadi setuju kita di Maluku semua Pak, cuma di Aceh itu pun kan ada prioritas lumbung ikan. Di sana Rp4,8 triliun ini untuk mengerukan saja Pak, cuma Pak Sekjen nggak jawab tadi maka saya respon langsung. Pak Syarif ikut dulu dalam pertemuan dengan masyarakat dan tim Kunker Komisi IV DPR RI Pak Sekjen. Di sana nggak sampai Rp4,8 triliun Pak, Rp50 miliar saja sudah cukup kalau itu pun.

Yang kedua Pak, ijin Pak Ketua, masalah gemar makan ikan Pak Sekjen. Saya kira Bapak tadi jawab nggak usah EO yang ini apalah, dengan dana sekian ratus yang diapakan nggak sampai 70 ribu. Terus terang saya

sampai sekarang bukan nggak mau, bagus program Pak, cuma banyak makan di EO Pak. Semua boleh teman-teman ini ditanya, bagus programnya kami sangat setuju dan terima kasih. Cuma bobot daripada, isi daripada gemar makan ikan nggak sesuai Pak.

Terima kasih, itu saja Pak Ketua.

KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.):

Ijin Pimpinan.

Yang pertama tadi Pak Sekjen, saya menanggapi Rp4,8 triliun. Inikan uang yang sangat besar sekali pada saat ini. Terus Bitung mau diapakan? Bitung itu infrastruktur sudah lengkap. Apa mungkin kalau Tuna atau Cakalang diekspor dari Maluku langsung ke Jepang sana. Ini permasalahannya, karena kemarin Gubernur Sulut juga telepon saya. Ini Bitung mau diapain Pak Ketua. Itu yang pertama.

Yang kedua, jujur saya ini kalau kunjungan sama Kementerian, sama Menteri takut saya. Edi Prabowo datang ke Lampung Timur, ini pendalaman alur gimana, gini-gini, gampang atur, bibit udang paname atur, setelah pulang wasalam. Begitu juga dulu sama Menteri Pertanian datang ke Lampung, gimana? Irigasi gampang PU saya titipkan duit Rp200 miliar untuk PU ini-ini, begitu pulang ya wasalam. Maka sampai hari ini *alhamdulillah* saya itu baru sekali, itupun karena peresmian kapal ke Batam selebihnya saya belum pernah kunjungan sama Menteri, saya takut, takut hal itu. Kerena nanti kan dibilangnya apa? Lah itukan ada Pak Sudin waktu Menteri ngomong. Dulu saya sebagai Anggota apalagi sekarang saya sebagai Ketua. Nah, Ketua kan sudah menyetujui. Jadi begini kita ini jangan balik-balik loh Pak Syarif, yang menentukan anggaran itu kita, rancangannya dari Bapak-bapak ini, jangan dibalik-balik. Jadi kalau nggak sesuai ya kita jangan setuju, itu saja. Karena apa? Mohon maaf Eselon I kalau bicara dengan kita Anggota Dewan lebih banyak kita Pak.

Saya ini 1 bulan 3 kali Pak ke Lampung, ke lapangan, baik itu saya rapat partai maupun ke lapangan. Yang seperti contohnya saya sama Pak Syarif itu meresmikan pasar ikan higienis, sekarang jadi apa itu. Rencananya pun saya nggak tahu, saya datang oh begini ya. Sekarang dilihat saja jadi apa, makanya kalau ada pembangunan-pembangunan pasar-pasar higienis atau apa tolong diinikan. Termasuk di Muara Baru itu saya yang menolak, tanya saja coba, saya menolak. Karena buat apa kalau untuk gagah-gagahan nyatanya gagal.

Yang terakhir ke Sumsel juga sama kosong melompong, karena pembangunannya terlalu besar, perawatannya bagaimana. Jangan kita bisa membangun, bisa membeli tapi perawatannya nggak ada ya wasalam. Itu loh yang terjadi. Jadi tolong sekali lagi kalau nanti pejabatnya sudah turun Eselon I sama Anggota Dewan apa yang dijanjikan dicatat, dibawa pulang langsung dimasukkan agenda "oh, tahun ini mulai September, berarti sudah tidak bisa lewat", ya tahun depan tinggal dimasukkan ini adalah aspirasi waktu kunjungan kerja.

Saya juga minta sama staf ahli ini dengarkan saya ngomong ini, kalau habis kunjungan harus dilaporkan di Rapat Dengar Pendapat atau Rapat Kerja. Saya nggak mau terjadi seperti itu lagi ya. Kemudian masalah misalnya tadi bantuan gemar makan ikan, kita cari solusi terbaik. Kalau memang ini nggak cocok karena banyak penyimpangan hapus, kalau cocok lanjutkan tapi dengan bagaimana yang baik supaya rakyat menerimanya dengan tersenyum, “datang jauh-jauh, ongkosnya Rp50.000 dikasih barang cuman Rp80.000”, misalnya. Orang datang akan pakai ongkos, pulang nilainya cuma Rp80.000, Gojeknya Rp50.000 bagaimana.

Saya maunya programnya harus jelas, dalam kesimpulan Rapat Kerja pun nanti misalnya ada bantuan ikan, jenis apa, berapa kilo. Coba saya juga nggak ngerti masa LO-LO nya dari Jakarta apalah, ampun. Kadang-kadang saya berpikir di Lampung apa nggak ada orang pintar, di Aceh apa nggak ada orang pintar, kan banyak yang mengerti masalah ini. Lebih rumit dari itu kan bisa, tinggal pengadaan tunjuk satu PT. PT ini kamu tunjuk ini, *goody bag*-nya tipe ini, kalau nggak ada ya sudah. Demikian.

Ada lagi? Cukup ya.
Tolong tampilkan.

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan mengenai Anggaran Belanja Tambahan (ABT) pada Kementerian Kelautan dan Perikanan TA 2021 sebesar Rp43.337.900.000,00 (empat puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang selanjutnya program ABT wajib melibatkan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil guna menyangga perekonomian di masa pandemi Covid-19, serta pemulihan kawasan mangrove, dan mengantisipasi bencana yang diakibatkan oleh perusakan mangrove.

Anggota?
Pemerintah?

SEKJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Setuju Pak.

KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.):

(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan dan mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap usulan Rencana Anggaran Belanja pada tahun 2022 yang semula sebesar Rp6.122.087.397.000,00 (enam triliun seratus dua puluh dua miliar delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp8.000.000.000.000,- (delapan triliun rupiah)....

Salah itu.

INTERUPSI ANGGOTA:

Bukannya 14 Pak Ketua, saya tadi lihatnya dari 6 tambah 8 jadi 14.

KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.):

Ya kan saya baca tulisan, saya tadikan di luar, makanya saya bilang inikan nggak benar berarti.

INTERUPSI ANGGOTA:

Benar nggak benar kita rubah Pak Ketua, dari tadi perdebatan saya sama Kiky begitu, dia 8 saya bilang 14. Coba dulu Pak Sekjen kasih tahu kita yang benar yang mana.

KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.):

Ditambah 8, dari 6 triliun 1,2 ditambah 8 triliun. Hitung lagi sudah betul, sekali lagi hitung.

2. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan dan mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap usulan Rencana Anggaran Belanja pada tahun 2022 yang semula sebesar Rp6.122.087.397.000,00 (enam triliun seratus dua puluh dua miliar delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ditambah sebesar Rp8.043.438.587.000,00 (delapan triliun empat puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp14.165.525.984.000,00 (empat belas triliun seratus enam puluh lima miliar lima ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah), dengan mengutamakan masukan serta saran dari Anggota Komisi IV DPR RI pada Rapat Dengar Pendapat bersama Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan hari ini dan melibatkan masyarakat kelautan perikanan yakni nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, pengolah dan pemasar hasil perikanan, serta pelaku usaha sektor kelautan perikanan, sehingga diharapkan menumbuhkan ekonomi masyarakat kelautan perikanan Indonesia.

Anggota?
Pemerintah?

(RAPAT: SETUJU)

3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan pendalaman dengan menghitung ulang kembali rancangan program, kegiatan, dan anggaran dalam pagu indikatif Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2022 yang mendukung pemulihan ekonomi masyarakat kelautan perikanan, diantaranya adalah:
 - a. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, seperti bantuan peningkatan kesejahteraan nelayan (seperti kapal perikanan 5 GT,

- alat penangkapan ikan, fasilitasi Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan, diversifikasi usaha nelayan, premi asuransi nelayan, kampung nelayan maju, dan fasilitasi jaminan hari tua nelayan), pengembangan korporasi nelayan, perizinan usaha, Bakti Nelayan dan penerapan e-logbook penangkapan ikan.
- b. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, seperti pembangunan kawasan tambak udang dan bandeng, pembangunan kampung perikanan budi daya, bantuan sarana prasarana budi daya (benih ikan, indukan ikan konsumsi dan hias), pakan mandiri, pra-sertifikat lahan budi daya, dan pengujian residu untuk ekspor dan kebijakan tata kelola bidang perikanan budi daya.
 - c. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Hasil Kelautan dan Perikanan, seperti pembangunan sentra kuliner ikan, pengembangan prasarana raiser ikan hias, sentra pengolahan ikan, sarana pascapanen, kampanye gemar ikan, promosi skala internasional, pasar ikan, perlengkapan pedagang ikan, peralatan pemasaran, chest freezer, pembinaan UMKM, gudang beku portable, gudang beku pada kawasan shrimp estate, sistem rantai dingin di sentra produksi perikanan, implementasi Sistem Resi Gudang, pabrik es, dan uji terap dan perekayasa produk kelautan perikanan.
 - d. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, seperti bantuan kelompok penggerak konservasi, Gerakan Cinta Laut, penanganan sampah di pesisir, rencana zonasi di Kawasan Strategi Nasional/ Kawasan Strategi Nasional Tertentu, Pengembangan Usaha Garam Rakyat, sarana prasarana wisata bahari, dermaga apung, dan bantuan ekonomi produktif di pesisir dan pulau-pulau kecil.
 - e. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, seperti peningkatan operasional kapal pengawas, peningkatan operasional pesawat patroli, pembangunan kapal pengawas, peningkatan operasional sistem pemantauan Sumberdaya Kelautan Perikanan, peningkatan operasional speedboat, pembinaan kelompok pengawas masyarakat, peningkatan operasional pengawasan kepatuhan kapal perikanan, peningkatan operasional pengawasan kawasan konservasi, IUU fishing dan destructive fishing.
 - f. Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, seperti pelatihan masyarakat kelautan perikanan, penyuluhan kelompok pelaku utama/usaha kelautan perikanan, pendidikan vokasi, riset pengolahan produk dan bioteknologi kelautan perikanan, model sosial dan ekonomi, stock assesment, dan sarana prasarana politeknik kelautan perikanan.
 - g. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, seperti peningkatan bakti mutu karantina, layanan sertifikasi karantina, penyelesaian kasus pelanggaran karantina ikan, sarana prasarana pengawasan karantina, penerapan standar sistem manajemen dan pengawasan di wilayah perbatasan.
 - h. Inspektorat Jenderal, seperti pelibatan pengawasan Itjen pada setiap program dan kegiatan di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Anggota?

Pemerintah?

SEKJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (Drs. ANTAM NOVAMBAR, S.H., M.Hum.):

Setuju.

KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.):

(RAPAT: SETUJU)

Satu lagi yang sangat menggelitik kemarin, saya nggak tahu kalau Dapil yang lain. Saya dapat bantuan ikan ya lumayan banyak lah, kemarin saya ke Institute Teknologi Sumatera, saya nggak tahu ikannya sebesar apa. Saya pikir bantuan ikan paling nggak segede gini bibitnya, *Alhamdulillah* sama korek api besaran korek api. Dan ini saya harus terbuka, saya mau tahu satu ekor berapa nilainya, kan selama ini kita nggak tahu ya kan. Bantuan ikan 1 juta ekor bibit benih, bawanya jauh dari Jambi Pak. Benar, kemarin begitu saya buka ya Allah malu saya, tapi saya sudah terlanjur. Nanti ditegur saja itu jangan iya-iya saja ya, tanya dia sebesar apa lebih kecil dari batang korek api. Saya diam saja langsung saya bilang “sudah gini saja, nanti minta CSR saja sama Petro Kimia Gresik”, karena dia punya pakan ikan. Bikin surat, saya bilang “saya bantu urus”, karena saya menutupi malu tadi itu loh.

4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengoptimalkan anggaran belanja pada tahun 2021 dan anggaran belanja tahun 2022 dengan mengutamakan program kegiatan padat karya serta pembinaan teknis dan penyuluhan kepada nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, pengolah dan pemasar hasil perikanan, serta pelaku usaha sektor kelautan perikanan.

Anggota?
Pemerintah?

SEKJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Setuju Pak.

KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.):

(RAPAT: SETUJU)

5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan mengutamakan program dan kegiatan yang ditujukan kepada anak-anak nelayan dan pelaku usaha kelautan perikanan untuk mendapatkan pendidikan pada Politeknik Kelautan dan Perikanan dengan dukungan yang proposional sesuai potensi daerah/wilayah pesisir kelautan perikanan Indonesia.

Anggota?
Pemerintah?

SEKJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Setuju.

KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.):

(RAPAT: SETUJU)

Dalam Rapat Kerja nanti kita masukkan ya porsinya berapa, misalnya Politeknik di Lampung jumlah mahasiswa berapa setiap tahun yang diambil. 100 bisa dicantumkan 25 orang untuk nelayan tidak mampu, ya Pak Sekjen nanti gitu ya, karena kita kan berbuat untuk rakyat ini.

6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya untuk berkomitmen mengalokasikan anggaran tahun 2022 serta menyelesaikan penyaluran program dan kegiatan Anggaran Belanja Tambahan tahun 2020 sebesar Rp114,85 miliar beserta anggaran pendampingan kelompok, berupa bantuan ikan konsumsi, udang, ikan hias, cacing sutera, kepiting, dan budi daya ikan dalam ember, mengingat kondisi pandemi Covid-19 saat ini masyarakat kelautan perikanan sangat membutuhkan untuk memulihkan perekonomian mereka.

Anggota?
Pemerintah?

SEKJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Setuju Pak.

KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.):

(RAPAT: SETUJU)

7. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyerahkan rincian kegiatan berdasarkan masukan pada rapat hari ini dan jawaban tertulis selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah RDP hari ini, untuk kemudian akan dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat selanjutnya dan diputuskan pada Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Anggota?

F-PDI P (RIEZKY APRILIA, S.H., M.Hum.):

Pimpinan.

KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.):

Ya.

F-PDI P (RIEZKY APRILIA, S.H., M.Hum.):

Rincian kegiatan berdasarkan masukan dan evaluasi tahun sebelumnya seperti halnya Pertanian juga kita minta gitu. Ijin Pimpinan, ini karena ada banyak aspirasi juga yang belum diturunkan, jadi saya rasa perlu evaluasi juga kegiatan sebelumnya.

KETUA RAPAT:

Sudah ditulis.

KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.):

Saya ulangi lagi.

7. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyerahkan rincian kegiatan berdasarkan masukan pada rapat hari ini dan evaluasi rincian kegiatan TA 2020/2021 serta jawaban tertulis selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah RDP hari ini, untuk kemudian akan dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat selanjutnya dan diputuskan pada Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Anggota?
Pemerintah?

SEKJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Kalau boleh nawar Pak, dua hari kerja Pak, jadi hari Jumat Pak.

KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.):

Kalau Jumat kan kita tutup Pak, ya Kamis saja diberikan jawabannya.

SEKJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Setuju Pak, hari Kamis Pak, hari Kamis.

KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.):

Kamis RDP-nya loh Pak. Ya harusnya kan nggak mungkin perencanaan Eselon I nggak punya *break down*-nya kan tinggal diprint saja. Rabu kami terima, mungkin tanggal 3 hari Kamis kita RDP kembali.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.Hum.):

Pimpinan, itukan tanggal 9 kalau nggak salah kita Raker kan ya.

KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.):

Rencana tanggal 7.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.Hum.):

Tanggal 7 Raker sama....

KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.):

Menteri Kelautan.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.Hum.):

KKP, ya sebelum itu saja Ketua.

KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.):

Nggak bisa, ini untuk RDP Kamis.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.Hum.):

Maksudnya lebih cepat lebih baik.

KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.):

Ya gimana, setuju ya.

SEKJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Setuju.

KETUA KOMISI IV DPR RI (SUDIN, S.E.):

(RAPAT: SETUU)

Terima kasih.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 18.00 WIB)

Jakarta, 31 Mei 2021

a.n. KETUA RAPAT
Sekretaris Rapat,

Ttd.

Drs. Achmad Agus Tommy
NIP. 196508171988031002